

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Kalijaten yang telah dilaksanakan tanggal 30 Mei 2022 – 2 Juli 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahasiswa calon apoteker dapat mempelajari dan melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mahasiswa calon apoteker dapat mempelajari dan melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek.
3. Mahasiswa calon apoteker dapat mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan pduli, komit dan antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan softskills untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Pahala Kalijaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa program studi profesi apoteker sebaiknya membekali diri terlebih dahulu sebelum kegiatan PKPA dilaksanakan.
2. Mahasiswa program studi profesi apoteker perlu meningkatkan kemampuan dalam hal komunikasi, kepercayaan diri dan pengetahuan di bidang farmasi agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian

kepada masyarakat dengan meyakinkan, benar dan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- AHFS, 2011, AHFS Drug Information, Bethesda: American Society of Health System Pharmacists.
- BNF. "British national Formulary 78 ed.". London: BMJ Group, 2020.
- Depkes RI, 2004, Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor.1027/Menkes/SK/IX/2004.
- Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2007. Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Drugbank. 2020, Open Data Drug & Drug Target Database, diakses pada 20 Oktober 2021.
- Ikatan Apoteker Indonesia, 2014. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Pedoman Praktik Apoteker Indonesia. Ikatan Apoteker Indonesia. Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta.
- Lacy, F. C., Lora, L. A., Morton, P. G., and Leonard, L.L. "Drug Information Handbook 17th edition". New York: American Pharmacists Association, 2009.
- McEvoy, G. K., et al. "AHFS Drug Information". USA: American Society of Health-System Pharmacists, 2011.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek". Jakarta: Peraturan

Menteri Kesehatan RI, 2016.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Pelayanan Berusaha”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2017.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2017.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2011.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian”. Jakarta: Peraturan Pemerintah RI, 2009.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2011 terkait Perubahan Registrasi, Izin Praktik dan Kerja Tenaga Kefarmasian”. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2011.

Mims. 2020, The Monthly Index of Medical Specialities, terdapat di: <https://www.mims.com/indonesia> diakses pada 20 Oktober 2021.

Notoatmodjo, S. 2012. Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta.

Republik Indonesia. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.

Republik Indonesia. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan”. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.2002